

PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI BERBASIS MULTIKULTURAL

Thoyyib Mas'udi
thoyyib61@yahoo.com

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

Abstract

Artikel ini mengupas mengenai pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikulturalisme. Kajian ini menemukan sejumlah prinsip-prinsip di balik model pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikulturalisme. Ciri pendidikan agama Islam yang berbasis multikulturalisme adalah belajar hidup dalam perbedaan, membangun rasa saling percaya, saling memahami dan menjaga rasa saling menghormati, konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan. Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikulturalisme dapat dilakukan melalui materi al-Qur'an, fiqih, akhlak, dan sejarah Islam. Dalam pengembangan tersebut, kurikulum perlu disusun dengan prinsip materi yang terintegrasi, proses konstruksi pengetahuan, kesetaraan pendidikan, dan prejudice reduction.

Kata Kunci: *Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Multikultural*

A. Pendahuluan

Isu pendidikan agama, dalam konteks bangsa Indonesia yang plural, multikultur, multietnis, dan multireligius menjadi isu yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius dari semua pihak untuk tidak memungkinkan terjadinya perpecahan persatuan dan kesatuan negara, yang tidak kondusif bagi proses demokratisasi di dalam negeri dan pertumbuhan kehidupan negara setelah negara mulai berkembang setelah Reformasi 1998. Karena dalam beberapa kasus, pada tataran pelaksanaan, Pasal 13A UU Sisdiknas tidak dilaksanakan dengan benar.

Banyak umat Islam yang menyesalkan bahwa sekolah swasta Kristen masih belum menyediakan pendidikan agama Islam untuk siswa Muslim. Padahal siswa Muslim sebenarnya adalah mayoritas siswa di sekolah tersebut. Tentu saja, masalah pendidikan agama yang tersisa dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi potensi bahaya, yang tidak hanya mengancam kelangsungan

pendidikan etnis di masa depan, tetapi juga hubungan antara umat Islam dan Kristen Indonesia kontemporer.

Secara teori, menurut Atho' Mudzhar, prinsip-prinsip yang terkandung dalam klausul agama dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk menghormati hak-hak pribadi setiap warga negara secara adil dan menghindari kerancuan dalam beragama, dan menghindari kemungkinan pemeluk agama dalam menegasikan pendidikan agama lainnya, bahkan mengajarnya menjalankan agama lain. Konversi keyakinan agama juga merupakan hak pribadi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya, konversi ini hanya sah jika yang bersangkutan sudah dewasa. Sebelum mencapai usia dewasa, keyakinan agama anak harus disamakan dengan orang tuanya. Mencoba memperlakukan anak dengan agama orang tuanya adalah penghormatan sejati terhadap keragaman dan keragaman agama.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 20 tentang sistem pendidikan nasional, mencerminkan dan memuat prinsip dan sudut pandang pendidikan multikultural. Pada prinsipnya peraturan tersebut memiliki dua tujuan khusus: *pertama*, untuk mencegah penyimpangan atau salah tafsir terhadap norma agama yang diajarkan oleh pendidik yang berbeda keyakinan agama; *kedua*, di hadapan pendidik yang memiliki keyakinan agama yang sama dengan peserta didik, dapat dijaga kerukunan umat beragama antar peserta didik yang berbeda keyakinan agama yang belajar di satuan pendidikan yang sama; dan *ketiga*, menjamin profesionalisme dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pendidikan agama.

Menyikapi keadaan di atas, salah satu solusi yang dapat diberikan adalah merumuskan kebijakan dan konsep pendidikan agama, mengelola dengan semangat multikultural daripada semangat doktrinal dipihak lain, atau menanamkan kebencian pada pemeluk agama lain, atau menumbuhkan rasa ketidakpedulian terhadap agama, atau melalui upaya mengubah keyakinan agama

siswa. Oleh sebab itu, kajian yang berkaitan dengan upaya menemukan konsep pendidikan agama berbasis multikultural perlu dilakukan. Hal tersebut dapat dimulai dengan merumuskan teori dan konsep Pendidikan Agama Islam (PAI) di komunitas Muslim dan lembaga pendidikan nasional di bawah koordinasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengembangan prinsip paradigma pendidikan agama Islam (PAI) yang berbasis multikulturalisme, sehingga penelitian ini dapat menemukan model pengembangan prinsip paradigma pendidikan agama Islam (PAI) berbasis multikulturalisme. Agenda pentingnya adalah berkontribusi secara teoritis dan praktis pada prinsip paradigma model pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural.

B. Hasil dan Pembahasan

Kurikulum Berbasis Multikultural

Pengembangan kurikulum dapat didefinisikan sebagai *the planning of learning opportunities intended to bring about certain desired in pupils and assessment of the extent to which these changes have taken place*.¹ Pengembangan kurikulum adalah rencana yang bertujuan untuk membawa siswa pada perubahan yang diinginkan dalam kesempatan belajar, dan evaluasi sejauh mana perubahan terjadi di kalangan siswa. Adapun makna kesempatan belajar pada pengertian di atas adalah hubungan antara siswa, guru, bahan peralatan, dan lingkungan belajar yang sudah direncanakan dan dikontrol agar belajar yang diinginkan dapat terjadi. Dengan demikian, semua perencanaan kesempatan belajar yang telah dirancang oleh guru bagi siswa merupakan kurikulum itu sendiri. Meskipun demikian, dalam pengembangan kurikulum seorang guru seyogyanya tetap memperhatikan dasar-dasar pengembangan kurikulum, yaitu berorientasi pada perwujudan sistem

¹ Audrey Nicholls dan S. Howard Nicholls dalam Oemar Hamolo, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006) 96.

pendidikan nasional, dikembangkan dengan pendekatan kemampuan, sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai dengan dasar standar nasional pendidikan, dikembangkan secara berdiversifikasi, dan mencakup aspek spiritual, intelektual, konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup, pola hidup sehat, estetik dan rasa kebangsaan.

Secara umum, sasaran pengembangan kurikulum adalah untuk mewujudkan harapan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam GBHN, dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Meski demikian, faktanya banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang mengembangkan kurikulumnya dengan mengikuti prinsip yang berbeda meskipun sarannya sama sebagaimana di atas. Disamping itu, meskipun penggunaan prinsip pengembangan kurikulum berbeda, namun hasil yang hendak dicapai oleh sekolah adalah sama, yakni memperlancar pelaksanaan proses pendidikan guna mewujudkan pendidikan nasional melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa maupun kebutuhan daerah.

Secara umum prinsip pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut: *pertama*, prinsip relevansi. Artinya pendidikan dipandang sebagai *invested of men power resources*. Lulusan pendidikan, seyogyanya mempunyai nilai relevansi dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Dengan demikian, diperlukan kurikulum yang bisa memproyeksikan tuntutan masa depan. Jika kualifikasi lulusan pendidikan relevan dengan tuntutan masyarakat, maka lulusan tersebut mempunyai nilai relevansi yang cukup memadai.

Kedua, prinsip efektifitas. Efektifitas berhubungan dengan sejauh mana perencanaan pendidikan dapat terlaksana. Jika ada 13 macam rencana kegiatan, namun hanya 7 kegiatan yang bisa dilaksanakan, maka efektifitas kegiatan belum cukup memadai. Demikian juga jika terdapat 8 tujuan yang diinginkan, namun

faktanya hanya 3 tujuan yang tercapai, maka upaya dalam mencapai tujuan tersebut kurang efektif.

Ketiga, Efisiensi. Efisiensi adalah keseimbangan antara pengeluaran dengan hasil yang dicapai. Sebab untuk menuntaskan suatu program diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang terkadang tidak sedikit jumlahnya yang bergantung pada jumlah program yang akan dituntaskan. Dalam konteks pelaksanaan kurikulum atau proses belajar mengajar, dapat dikatakan efisien apabila pengeluaran (upaya, biaya, dan waktu) yang dipakai dalam menyelesaikan program pengajaran menghasilkan hasil yang optimal.

Keempat, Prinsip Kesenambungan (*Continuitas*). Kurikulum sebagai instrumen belajar, seyogyanya dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Artinya, terdapat ketersaling hubungan antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi dalam pengembangan kurikulum.

Kelima, Prinsip Fleksibilitas. Prinsip ini merujuk pada makna ketidak-kakuan. Artinya terdapat ruang gerak dengan sedikit kebebasan dalam menentukan tindakan. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan perbedaan kondisi yang ada dalam diri peserta didik. Karenanya, pemilihan program pendidikan yang relevan dengan bakat, minat, kebutuhan, dan lingkungannya harus diberikan kebebasan.

Keenam, Prinsip Berorientasi Pada Tujuan. Prinsip mengandaikan bahwa langkah pertama yang dijalankan oleh seorang guru sebelum bahan belajar ditentukan adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai melalui semua kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik maupun guru. Dengan begitu, metode mengajar, alat pengajaran dan evaluasi dapat ditentukan secara tepat oleh guru.

Ketujuh, Prinsip Pendidikan Seumur Hidup. Prinsip ini mengandaikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik dapat diberikan oleh lembaga pendidikan ketika tamat dari sekolah. Selain itu, bekal kemampuan untuk dapat mengembangkan diri secara mandiri juga harus diberikan oleh lembaga pendidikan.

Sementara itu, Multikultural secara sederhana bermakna keberagaman budaya.² Dalam konteks makna keberagaman, terdapat tiga istilah yang memiliki kemiripan makna untuk melukiskan keberagaman masyarakat, yaitu *plurality*, *diversity* dan *multicultural*. Ketiga istilah ini sama-sama mengacu pada adanya ketidaktunggalan, tetapi tidak selalu mempresentasikan makna yang sama. Istilah *plurality* mengandaikan arti adanya sesuatu yang lebih dari satu. Adapun *diversity* merujuk pada arti eksistensi sesuatu yang lebih dari satu tersebut itu hakikatnya berbeda-beda, heterogen, dan tidak dapat disamakan. Dibandingkan dengan dua konsep tersebut, *multicultural* merupakan istilah yang relatif baru. Secara konseptual ada perbedaan antara *plurality*, *diversity*, dan *multicultural*. Inti dari multikulturalisme sesungguhnya adalah kesediaan untuk menerima kelompok yang lain sebagai suatu kesatuan, tanpa peduli dengan berbagai perbedaan, baik budaya, tradisi, etnis, gender, bahasa, kepercayaan maupun agama.

Jika *plurality* hanya merujuk pada adanya kemajemukan, maka multikulturalisme merujuk pada penegasan bahwa mereka di dalam ruang publik adalah sama dengan segala perbedaannya. Implikasinya, multikultural menjadi tanggapan kebijakan baru terhadap keragaman dengan menunjukkan bahwa keberadaan komunitas yang berbeda tidaklah cukup, namun yang paling penting adalah komunitas-komunitas itu dapat diperlakukan oleh negara dengan sama dan setara dengan komunitas lainnya. Oleh karena itu multikulturalisme adalah

² Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*, (London: Sage Publication, 2002), 2-6.

gerakan yang membutuhkan pengakuan (*politics of recognition*),³ semua perbedaan dalam masyarakat harus diterima, dihormati, dilindungi dan dijamin.

Diversity dalam masyarakat modern dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan yang diterima secara alamiah oleh individu atau kelompok yang dibentuk secara bersama sehingga menjadi sebuah *common sense*. Perbedaan ini menurut Parekh bisa klasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu: *pertama*, perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yakni individu atau kelompok masyarakat yang memiliki pandangan hidup dan kebiasaan yang berbeda dengan sistem nilai atau budaya yang berlaku komunitas yang lebih besar. *Kedua*, perbedaan dalam perpektif (*perspectival diversity*), yakni individu atau kelompok dengan sudut pandang yang kritis terhadap sistem nilai atau budaya mainstream yang diikuti oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok memiliki gaya hidup yang orisinil sesuai dengan identitas komunalnya (*indigeneous people way of life*).⁴

Menurut Parekh, gerakan multikulturalis tidak muncul sampai tahun 1970-an, pertama di Kanada dan Australia, dan kemudian di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Sejak itu, perkembangan multikulturalisme begitu pesat sehingga dalam tiga puluh tahun sejak diperkenalkan, multikulturalisme telah mengembangkan dua gelombang penting. Gelombang pertama, multikulturalisme adalah perjuangan untuk mengenali budaya yang berbeda. Oleh

³ *Politics of recognition* dikemukakan oleh Charles Taylor pada 1992 di depan kuliah terbuka di Princeton University. Mulanya gagasannya adalah gagasan politik yang kemudian berkembang di kajian lain, filsafat, sosiologi, budaya dan lainnya. Gagasannya dipengaruhi oleh pandangan Jean-Jacques Rousseau dalam *Discourse Inequality* dan kesamaan martabat (*equal dignity of human rights*) yang dicetuskan Immanuel Kant. Gagasan Taylor bersumber pada pertama, bahwa sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama. Kedua, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan hal yang ketiga, yaitu pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua element sosial-budaya, termasuk juga negara. Charles Taylor. "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman, *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*, (Princeton: Princeton University Press, 1994),18.

⁴ *Ibid.*, 3-4.

karena itu, masalah mengidentifikasi kebutuhan (*needs of recognition*) merupakan ciri utama gelombang pertama. Sedangkan gelombang kedua merupakan multikulturalisme yang mengabsahkan berbagai keragaman budaya. Gelombang kedua ini, datang dengan mengalami beberapa tahapan gerakan, yaitu:⁵ kebutuhan akan pengakuan, keterlibatan keilmuan interdisipliner, pembebasan atas imperialisme dan kolonialisme, pembebasan atas kelompok identitas dan masyarakat adat (*indigeneous people*), postkolonialisme, globalisasi, postnasionalisme, postmodernisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat.⁶

Tujuan penting atas kurikulum multikultural salah satunya adalah mendorong semua siswa untuk mendapatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran-peran mereka pada masyarakat demokratis dan pluralistik secara efektif. Selain itu, kurikulum multikultural juga diperukan bagi siswa untuk dapat berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan anggota dari kelompok yang beragam sehingga dapat tercipta tatanan sosial masyarakat yang bermoral untuk kebaikan satu sama lain.

Dalam pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan multikultural, Ngainun Naim dan Ahmad Sauqi,⁷ menyarankan untuk mengikuti sejumlah prinsip penting yang diantaranya adalah: *pertama*, penentuan filsafat, teori, model, dan hubungan antara sekolah dengan budaya setempat sebaiknya didasarkan pada keragaman budaya yang ada. *Kedua*, pengembangan komponen kurikulum sebaiknya juga didasarkan pada keragaman budaya yang ada. *Ketiga*, sumber dan objek belajar merupakan budaya dalam dunia pendidikan, dan harus menjadi bagian dari kegiatan belajar peserta didik. *Keempat*, peran kurikulum adalah menjadi media dalam pengembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan

⁵ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 83.

⁶ Gregory Jay. "Critical Contexts For Multiculturalism" dalam <http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/contextsmulticult.htm>.

⁷ Ngainun Naim & Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 198.

nasional. Secara praktis pelaksanaan kurikulum multikultural di sekolah pada kuncinya adalah tidak ada kebijakan sekolah yang menghambat toleransi, memfasilitasi untuk menumbuhkan kepekaan siswa terhadap berbagai keragaman budaya, membiarkan siswa merayakan hari raya keagamaan dengan bebas dan memperkuat sikap mereka untuk merasakan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural

Pendidikan agama Islam berbasis multikultural merupakan proses transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan aspek keragaman dan keterbatasan manusia sebagai suatu *sunnatullah* yang harus diterima secara bijaksana di tengah realitas kemanusiaan yang plural dalam berbagai dimensinya untuk mewujudkan tatanan kehidupan manusia yang berkeadilan. Oleh karena itu, premis pendidikan Islam multikultural adalah melakukan inovasi dan reformasi pendidikan dalam proses pendidikan agama Islam, mengenal dan identifikasi keberagaman, pertemuan lintas batas, saling ketergantungan dan kerjasama, serta proses pembelajaran dan interaktif yang efektif.

Untuk mewujudkan pendidikan agama Islam multikultural, Zakiyuddin Baidhawiy merumuskan sejumlah ciri-ciri khusus pendidikan agama Islam berwawasan multikultural yang perlu disediakan, yaitu:⁸ belajar hidup dalam perbedaan, membangun rasa saling percaya, menjaga saling pengertian, menjaga rasa saling menghormati, konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan.

Dari segi materi, pendidikan agama Islam multikultural membutuhkan pengembangan materi pembelajaran yang bernuansa multikultural. *Pertama*, perlu ditentukan kitab suci pada materi al-Qur'an. Selain ayat-ayat tentang Akidah, perlu

⁸ Zakiyuddin Baidhawiy dalam Edi Susanto, Edi Susanto, "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pendidikan Agama Islam Multikultural Pluralistik (Perspektif Sosiologi Pengetahuan); Disertasi, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel, 2011)

juga ditambahkan ayat-ayat yang bisa membawa pemahaman sekaligus internalisasi sikap terbuka ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Hal ini diperlukan agar tertanam sikap toleran, dan inklusif pada siswa sejak dini. Beberapa materi al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini, yaitu: a) materi yang berkaitan dengan pengakuan al-Qur'an terhadap keragaman dan berlomba-lomba dalam kebaikan seperti QS. al-Baqarah ayat 148; b) materi yang berkaitan dengan pengakuan atas koeksistensi dalam interaksi antar umat beragama, seperti QS. al-Mumtahanah ayat 8-9); c) materi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan seperti QS. an-Nisa' :135. *Kedua*, materi fiqih. Materi ini dapat diperluas dengan materi fikih *siyasah*. Sebab melalui fikih *siyasah*, memuat konsep tentang kebangsaan sebagaimana yang dicontohkan rasulullah, sahabat, maupun perilaku khalifah sesudahnya. *Ketiga*, materi akhlak. Materi ini baiknya memfokuskan kajian tentang *hablun min Allah*, Rasul, sesama manusia, dan diri sendiri, serta lingkungan sekitar. Materi ini menjadi penting sebab berkaitan erat dengan dasar-dasar kebangsaan. Karena pembangunan suatu bangsa tergantung pada Akhlak masyarakatnya. Artinya jika suatu bangsa tidak memiliki akhlak yang baik, maka punahlah sudah bangsa tersebut sebagaimana cerita kehancuran kaum Nabi Luth. *Keempat*, materi sejarah Islam. Materi ini merupakan kajian yang bersumber dari realitas historis yang diambil dari praktik-praktik interaksi sosial rasulullah tatkala membangun masyarakat di Madinah. Sebab secara historis, proses pembangunan tersebut melibatkan aktivitas dan sikap pengakuan dan penghargaan atas nilai keragaman sekaligus toleransi.⁹

Program pendidikan agama Islam multikultural yang akan dikembangkan merupakan program pendidikan yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang

⁹ Bukti empiris sejarah peradaban Islam di masa lalu, menunjukkan Islam tampil secara inklusif dan sangat menghargai non-muslim. Sikap inklusif ini ada karena al-Qur'an mengajarkan paham *religius plurality*. Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keragaman agama. Meskipun kebenaran agama ada pada Islam (lihat: QS. Ali Imran: 13), namun dalam al-Qur'an juga disebutkan adanya hak orang lain untuk beragama. Dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain (lihat: QS. al-Baqarah : 256). Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.

sesuai dengan kebutuhan dasar akademik dan sosial. Program pendidikan agama Islam dapat memperoleh dan mewujudkan potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil. Oleh karena itu, perlu dirumuskan rencana pendidikan agama Islam dengan cara sebagai berikut: *pertama*, integrasi konten, yaitu integrasi berbagai budaya kelompok masyarakat untuk diilustrasikan dalam tema; *kedua*, proses konstruksi pengetahuan memungkinkan siswa memahami makna budaya suatu mata pelajaran; *ketiga*, metode pengajaran yang adil, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa berdasarkan ras, budaya, atau sosial; dan *keempat*, untuk mengurangi prasangka, dapat mengidentifikasi karakteristik siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.

C. Simpulan

Dari paparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ciri pendidikan agama Islam yang berbasis multikulturalisme adalah belajar hidup dalam perbedaan, membangun rasa saling percaya, saling pengertian, dan menuntut sikap saling menghormati, konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan. Kurikulum pendidikan agama Islam multikultural dapat dikembangkan melalui materi al-Qur'an, fiqh, akhlaq dan sejarah Islam. Dalam perkembangannya, kurikulum perlu didasarkan pada prinsip integrasi konten, proses konstruksi pengetahuan, metode pengajaran yang adil dan pengurangan prasangka.

Daftar Rujukan

Atho' Mudzhar, Pendidikan Agama dengan Wawasan Multikultural, Makalah dalam Workshop Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural (Bali, 20-21 Agustus 2004)

Audrey Nicholls dan S. Howard Nichools dalam Oemar Hamolo, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*, (London: Sage Publication, 2002)

Charles Taylor. "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman, *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*, (Princeton: Princeton University Press, 1994)

H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Gregory Jay. "Critical Contexts For Multiculturalism" dalam <http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/contextsmulticult.htm>.

Ngainun Naim & Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Zakiyuddin Baidhawiy dalam Edi Susanto, Edi Susanto, "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pendidikan Agama Islam Multikultural Pluralistik (Perspektif Sosiologi Pengetahuan); Disertasi, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel, 2011)